



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10167-10175

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengelolaan Keuangan Operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya

Yogi Surya Bhakti, R. Yuniardi Rusdianto

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

23042010225@student.upnjatim.ac.id, rusdiyanto.adbis@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pengelolaan keuangan operasional merupakan aspek penting dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan, khususnya pada organisasi dengan volume transaksi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya dengan fokus pada penerapan pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi selama kegiatan magang yang dilaksanakan penulis di Departemen Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya telah didukung oleh mekanisme pengendalian internal yang memadai, antara lain melalui penerapan sistem maker, checker, dan validator dalam setiap proses transaksi keuangan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi seperti PASSION, STREAM, SIMPONI, eTrust, dan SAP berperan penting dalam meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi pencatatan data keuangan, transparansi pelaporan, serta efektivitas pengawasan kantor wilayah terhadap cabang. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala berupa potensi perbedaan data antar sistem dan perlunya peningkatan koordinasi antar unit kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya telah berjalan cukup efektif, namun tetap memerlukan peningkatan ketelitian dan koordinasi guna meminimalkan risiko kesalahan dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih optimal.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Operasional, Pengendalian Internal, Sistem Informasi Keuangan

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan operasional merupakan elemen fundamental dalam mendukung kelancaran aktivitas organisasi, khususnya pada lembaga keuangan yang memiliki tingkat transaksi tinggi dan kompleks. Keuangan operasional mencakup pengelolaan kas, pengendalian anggaran, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Informasi keuangan yang andal menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan manajerial serta evaluasi kinerja organisasi (Rahayu & Budiasih, 2024). Lembaga keuangan menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan operasional, antara lain tingginya volume transaksi, penggunaan berbagai instrumen pembayaran, serta keterlibatan banyak unit kerja. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan perbedaan data antar sistem. Oleh karena itu, penerapan pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi menjadi kebutuhan utama dalam menjaga keandalan pengelolaan keuangan (Nasution et al., 2024).

PT Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa keuangan memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, PT Pegadaian mengelola dana dalam jumlah besar sehingga dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan operasional yang efektif menjadi prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan mendukung pencapaian kinerja perusahaan. Pada tingkat kantor wilayah, pengelolaan keuangan operasional memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena kantor wilayah berfungsi sebagai pengendali dan pengawas aktivitas keuangan seluruh cabang. PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya membawahi banyak cabang dengan karakteristik transaksi yang beragam, baik transaksi tunai maupun non-tunai, sehingga memerlukan mekanisme monitoring dan pengawasan keuangan yang efektif agar aktivitas operasional cabang tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, kantor wilayah juga berperan dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi keuangan cabang. Proses tersebut meliputi pemantauan saldo rekening cabang, pengendalian Modal Kerja Harian (MOKER), verifikasi transaksi keuangan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kewajiban non-operasional seperti bea lelang. Untuk mendukung fungsi tersebut, PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya memanfaatkan berbagai sistem informasi keuangan terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi pencatatan, dan transparansi pengelolaan keuangan. Meskipun telah didukung oleh sistem dan pengendalian internal, pengelolaan keuangan operasional di tingkat kantor wilayah masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan waktu pelaporan cabang, ketergantungan pada ketelitian sumber daya manusia, serta potensi ketidaksesuaian data antar sistem. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang intensif, penerapan pengendalian internal yang konsisten, serta pemanfaatan sistem informasi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya guna memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan operasional serta kontribusinya dalam mendukung efektivitas pengawasan dan kelancaran operasional cabang.

Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), pengelolaan keuangan operasional memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Lembaga keuangan, termasuk PT Pegadaian, dituntut untuk mampu menyajikan informasi keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Kegagalan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan operasional berpotensi menimbulkan risiko keuangan, penurunan kinerja, serta berkurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan keuangan operasional pada lembaga keuangan mengalami transformasi dari sistem manual menuju sistem berbasis digital yang terintegrasi. Pemanfaatan sistem informasi keuangan memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan real time. Namun demikian, implementasi sistem informasi keuangan juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait integrasi antar sistem, konsistensi data, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan keuangan operasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kualitas penerapan dan pengendalian atas sistem tersebut.

Pada tingkat kantor wilayah, peran sistem informasi keuangan menjadi semakin krusial karena kantor wilayah berfungsi sebagai pusat pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas keuangan cabang. Kantor wilayah dituntut untuk mampu mengolah data keuangan dari berbagai cabang dengan karakteristik transaksi yang berbeda-beda. Perbedaan volume transaksi, jenis layanan, serta kondisi operasional cabang berpotensi menimbulkan variasi data yang memerlukan proses verifikasi dan analisis yang cermat. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan operasional yang efektif menjadi instrumen penting dalam menjaga keseragaman standar pengelolaan keuangan di seluruh cabang. Selain aspek teknis dan sistem, faktor sumber daya manusia juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan operasional. Kompetensi, ketelitian, dan kepatuhan pegawai terhadap prosedur yang berlaku menjadi penentu utama dalam meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan penyimpangan administrasi. Oleh karena itu, koordinasi antar unit kerja serta penerapan mekanisme pengendalian internal yang konsisten menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam praktik pengelolaan keuangan operasional di tingkat kantor wilayah.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Analisis terhadap praktik pengelolaan keuangan operasional di tingkat kantor wilayah diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengendalian internal dan sistem informasi keuangan berkontribusi dalam mendukung efektivitas pengawasan serta kelancaran operasional cabang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pengembangan pengelolaan keuangan operasional yang lebih optimal di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam proses pengelolaan keuangan operasional sebagaimana yang berlangsung dalam praktik, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel secara kuantitatif. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mampu menangkap kondisi nyata, dinamika operasional, serta karakteristik khusus pengelolaan keuangan operasional yang diterapkan di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya.

Penelitian dilaksanakan di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya yang memiliki peran strategis sebagai unit pengendali dan pengawas aktivitas keuangan seluruh cabang di wilayah kerjanya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fungsi kantor wilayah sebagai pusat koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan cabang, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme pengelolaan keuangan operasional di tingkat wilayah. Selain itu, kantor wilayah menjadi titik temu antara kebijakan perusahaan dan pelaksanaan operasional cabang, sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan operasional selama pelaksanaan kegiatan magang. Observasi tersebut mencakup proses monitoring saldo rekening cabang, pengendalian Modal Kerja Harian (MOKER), verifikasi transaksi keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan operasional, peneliti dapat memahami alur kerja, prosedur, serta peran masing-masing unit kerja dalam pengelolaan keuangan operasional.

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang meliputi laporan keuangan, standar operasional prosedur (SOP), kebijakan internal perusahaan, serta data dan informasi yang bersumber dari sistem keuangan perusahaan. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan hasil observasi, serta sebagai bahan perbandingan antara ketentuan tertulis dengan praktik yang diterapkan di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas pengelolaan keuangan operasional sesuai dengan tugas yang diberikan selama kegiatan magang. Pendekatan observasi partisipatif ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kerja, pola koordinasi antar unit, serta potensi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan operasional. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, laporan, dan catatan administrasi yang relevan dengan objek penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pengelolaan keuangan operasional, penerapan pengendalian internal, dan pemanfaatan sistem informasi keuangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dengan membandingkan temuan lapangan dengan konsep dan teori yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan kondisi nyata pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya.

3. Hasil dan Diskusi

Pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya merupakan salah satu fungsi strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran arus keuangan perusahaan. Melalui pengelolaan yang terstruktur, kantor wilayah memastikan bahwa setiap penggunaan dana operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta selaras dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran menjadi indikator utama dalam menilai kinerja keuangan operasional di tingkat wilayah.

Sebagai unit pengendali, Kantor Wilayah XII Surabaya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pada seluruh cabang yang berada di bawah koordinasinya. Kegiatan tersebut mencakup pengawasan terhadap transaksi keuangan, pencatatan administrasi, serta kepatuhan cabang terhadap prosedur dan kebijakan keuangan perusahaan. Dengan adanya fungsi pengendalian ini, kantor wilayah dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini dan mengambil langkah korektif yang diperlukan.

Pengawasan yang dilakukan oleh kantor wilayah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan cabang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Koordinasi yang baik antara kantor wilayah dan cabang menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi data keuangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana operasional. Dengan demikian, peran

kantor wilayah tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengarah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan berkelanjutan.

Pengelolaan Keuangan Operasional

Pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas yang terstruktur, meliputi pemantauan saldo rekening cabang, pengelolaan kas harian, serta pengendalian arus dana masuk dan keluar. Aktivitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan operasional cabang dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan yang terencana menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas operasional serta mendukung kelancaran pelayanan kepada nasabah.

Salah satu aktivitas utama yang dilakukan oleh kantor wilayah adalah monitoring Modal Kerja Harian (MOKER) cabang dengan memanfaatkan sistem PASSION. Sistem ini memungkinkan kantor wilayah untuk mengetahui posisi saldo masing-masing cabang secara berkala dan terintegrasi, sehingga kondisi keuangan cabang dapat dipantau secara lebih akurat. Melalui monitoring MOKER, kantor wilayah dapat memastikan bahwa saldo cabang berada dalam batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan operasional masing-masing cabang.

Monitoring MOKER memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga likuiditas cabang serta mencegah terjadinya kekurangan dana operasional. Likuiditas yang terjaga memungkinkan cabang untuk menjalankan aktivitas pelayanan secara optimal tanpa mengalami hambatan akibat keterbatasan dana. Apabila ditemukan kondisi saldo cabang berada di bawah standar yang ditentukan, kantor wilayah dapat segera melakukan koordinasi dengan cabang terkait untuk melakukan penyesuaian atau pergeseran dana. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian dini guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap kelancaran operasional cabang.

Praktik monitoring dan koordinasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya bersifat preventif dan berorientasi pada pengendalian risiko. Pengendalian dilakukan tidak hanya ketika permasalahan telah terjadi, tetapi juga melalui upaya antisipatif untuk menghindari potensi gangguan operasional di masa mendatang. Dengan pendekatan preventif ini, kantor wilayah dapat menjaga kestabilan keuangan cabang serta meminimalkan risiko ketidaksesuaian penggunaan dana operasional.

Selain pengelolaan MOKER, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan juga dilakukan secara rutin melalui sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Setiap transaksi keuangan yang terjadi di cabang dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga data keuangan dapat dihimpun secara sistematis dan konsisten. Pemanfaatan sistem informasi keuangan ini memudahkan kantor wilayah dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan cabang serta memantau tingkat kepatuhan cabang terhadap kebijakan dan prosedur keuangan perusahaan.

Evaluasi yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan cabang menjadi dasar bagi kantor wilayah dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan operasional. Melalui evaluasi tersebut, kantor wilayah dapat mengidentifikasi kecenderungan penggunaan dana, potensi penyimpangan, serta area yang memerlukan perbaikan. Proses evaluasi ini mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat dan berbasis pada data keuangan yang andal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Rahayu dan Budiasih (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan operasional yang tertib, terstruktur, dan didukung oleh sistem informasi yang memadai dapat meningkatkan keandalan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya tidak hanya berperan sebagai fungsi administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Pengendalian Internal Keuangan

Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya diterapkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengendalian internal berfungsi sebagai alat

pengawasan yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, menjaga keandalan informasi keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan pengendalian internal yang memadai, risiko kesalahan pencatatan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan operasional dapat diminimalkan.

Salah satu bentuk penerapan pengendalian internal keuangan adalah penggunaan mekanisme maker, checker, dan validator dalam setiap proses transaksi keuangan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya diproses oleh satu pihak, melainkan telah melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan berlapis sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan. Dengan adanya pembagian peran tersebut, proses transaksi menjadi lebih terkontrol dan risiko terjadinya kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan wewenang dapat ditekan secara signifikan.

Dalam pengelolaan anggaran, pengendalian internal diterapkan melalui proses persetujuan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran (SPPA) yang dilakukan menggunakan aplikasi STREAM. Setiap pengajuan pergeseran anggaran harus melalui proses evaluasi dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi dan ketentuan perusahaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan anggaran dilakukan secara terencana, memiliki dasar yang jelas, serta tidak menyimpang dari rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain pengendalian anggaran, pengendalian internal keuangan juga dilakukan melalui monitoring transaksi non-tunai menggunakan aplikasi eTrust. Monitoring ini bertujuan untuk mendeteksi potensi selisih transaksi EDC serta memastikan kesesuaian antara data transaksi yang tercatat dalam sistem dengan kondisi sebenarnya. Dengan adanya monitoring transaksi non-tunai secara berkala, kantor wilayah dapat mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk menjaga keandalan data keuangan.

Penerapan pengendalian internal keuangan tersebut sejalan dengan pendapat Kusumawardhany dan Kurnia Shant (2023) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mampu menurunkan risiko salah saji laporan keuangan serta meningkatkan kualitas informasi keuangan. Pengendalian internal yang berjalan dengan baik memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial secara tepat dan bertanggung jawab.

Selain mekanisme persetujuan dan monitoring sistem, pengendalian internal keuangan juga diperkuat melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab antar unit kerja yang terlibat dalam proses keuangan operasional. Pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan pencatatan, pemeriksaan, dan persetujuan transaksi bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang saling mengontrol atau checks and balances. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, setiap tahapan proses keuangan memiliki pengawasan yang memadai sehingga potensi terjadinya kecurangan maupun kesalahan administratif dapat ditekan.

Struktur pengendalian internal yang jelas dan konsisten turut berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan operasional. Setiap unit kerja memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan secara lebih tertib dan terkontrol. Penerapan pemisahan fungsi dan mekanisme pengawasan berlapis ini mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik serta menjaga keandalan informasi keuangan, baik di tingkat kantor wilayah maupun cabang.

Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan

Pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya. Sistem informasi keuangan digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi operasional harian hingga penyusunan laporan keuangan di tingkat kantor wilayah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkoordinasi antar unit kerja.

Dalam praktiknya, PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya memanfaatkan beberapa sistem informasi keuangan yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Sistem PASSION digunakan untuk mendukung transaksi operasional serta monitoring saldo rekening cabang, sehingga kantor wilayah dapat memantau kondisi keuangan cabang secara berkala. Sistem STREAM dimanfaatkan dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait proses pergeseran anggaran yang memerlukan persetujuan berjenjang. Sementara itu, sistem SIMPONI digunakan untuk mendukung pembayaran bea lelang, eTrust untuk monitoring transaksi non-tunai, serta SAP untuk pencatatan dan pengelolaan general ledger sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan.

Penggunaan berbagai sistem informasi keuangan tersebut memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Proses pencatatan yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur melalui sistem. Selain itu, integrasi antar sistem informasi keuangan mempermudah proses konsolidasi data keuangan dari seluruh cabang, sehingga kantor wilayah dapat memperoleh informasi keuangan yang lebih lengkap dan konsisten.

Pemanfaatan sistem informasi keuangan juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan operasional. Data keuangan yang tersimpan dalam sistem dapat ditelusuri dan diverifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, sehingga mendukung proses pengawasan dan audit internal. Transparansi ini menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan, baik di tingkat kantor wilayah maupun cabang.

Integrasi sistem informasi keuangan turut mempermudah proses pengawasan dan pelaporan keuangan di tingkat kantor wilayah. Kantor wilayah dapat melakukan monitoring terhadap aktivitas keuangan cabang secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Informasi keuangan yang diperoleh melalui sistem menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan cabang serta dalam mengidentifikasi potensi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Josepina dan Sujana (2024) serta Wakum et al. (2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan keuangan.

Selain meningkatkan efisiensi dan akurasi, pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi juga mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat dan berbasis data. Informasi keuangan yang tersaji secara real time memungkinkan pihak manajemen kantor wilayah untuk melakukan analisis kinerja keuangan cabang secara lebih cepat dan komprehensif. Dengan informasi yang memadai, manajemen dapat merumuskan langkah-langkah pengendalian dan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional.

Dengan demikian, penggunaan sistem informasi keuangan di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan evaluasi yang bersifat strategis. Pemanfaatan sistem informasi keuangan yang optimal menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan operasional serta pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Peran Kantor Wilayah dalam Koordinasi Keuangan Cabang

PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kegiatan keuangan cabang agar selaras dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai perpanjangan tangan kantor pusat, kantor wilayah berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan strategis yang ditetapkan di tingkat pusat dengan pelaksanaan operasional keuangan di tingkat cabang. Melalui fungsi koordinasi tersebut, kantor wilayah memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan dapat diimplementasikan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Koordinasi keuangan yang dilakukan oleh kantor wilayah bertujuan untuk menjaga keseragaman dalam pengelolaan keuangan operasional antar cabang. Dengan adanya koordinasi yang terstruktur, kantor wilayah dapat memastikan bahwa setiap cabang memahami dan menerapkan prosedur keuangan secara tepat. Hal ini penting mengingat perbedaan karakteristik operasional dan volume transaksi antar cabang berpotensi menimbulkan variasi dalam praktik pengelolaan keuangan apabila tidak diimbangi dengan koordinasi yang memadai.

Dalam praktiknya, kantor wilayah secara aktif melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan cabang terkait berbagai aspek keuangan, seperti posisi saldo rekening, realisasi anggaran, serta transaksi keuangan yang memerlukan penyesuaian atau tindak lanjut. Komunikasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data keuangan yang dilaporkan oleh cabang sesuai dengan kondisi aktual serta tidak terjadi perbedaan pencatatan antar unit kerja. Proses klarifikasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Proses koordinasi yang berjalan secara berkelanjutan juga mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan keuangan di tingkat kantor wilayah. Melalui koordinasi yang efektif, kantor wilayah dapat membantu cabang dalam menyelesaikan permasalahan administratif yang timbul selama kegiatan operasional, baik yang berkaitan

dengan pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, maupun penggunaan anggaran. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga bersifat pembinaan dan pendampingan terhadap cabang.

Koordinasi keuangan yang baik turut berperan dalam meminimalkan potensi terjadinya kesalahan administrasi maupun perbedaan data antar unit kerja. Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau permasalahan dalam pengelolaan keuangan, kantor wilayah dapat segera melakukan tindak lanjut bersama cabang terkait. Langkah ini membantu mencegah permasalahan berkembang menjadi kendala yang lebih besar dan berpotensi mengganggu kelancaran operasional cabang.

Peran koordinatif yang dijalankan oleh kantor wilayah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan operasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan prosedur yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antar unit kerja. Koordinasi yang efektif memungkinkan terjadinya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan keuangan, sehingga mendukung keteraturan serta kelancaran aktivitas keuangan cabang.

Dengan demikian, peran kantor wilayah dalam koordinasi keuangan cabang menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya. Koordinasi yang berjalan dengan baik berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan keuangan, baik di tingkat kantor wilayah maupun cabang.

Keterkaitan Pengelolaan Keuangan Operasional dengan Efektivitas Operasional

Pengelolaan keuangan operasional memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas operasional organisasi, khususnya pada lembaga keuangan yang memiliki tingkat aktivitas dan transaksi yang tinggi. Pengelolaan keuangan yang terencana, terkontrol, dan sistematis memungkinkan perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana operasional secara tepat waktu, sehingga seluruh aktivitas pelayanan kepada nasabah dapat berjalan tanpa hambatan. Ketersediaan dana yang memadai menjadi prasyarat penting bagi kelancaran operasional, baik dalam mendukung kegiatan pelayanan, administrasi, maupun pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Puspita et al. (2024) dan Triono dan Dewi (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan arus kas dan pengendalian keuangan yang baik berkontribusi terhadap stabilitas dan efektivitas kegiatan operasional organisasi.

Pada tingkat kantor wilayah, efektivitas pengelolaan keuangan operasional menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga stabilitas dan kelancaran proses operasional cabang. Kantor wilayah berperan dalam memastikan bahwa setiap cabang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui pengelolaan keuangan yang efektif, kantor wilayah dapat mencegah terjadinya gangguan operasional yang disebabkan oleh keterbatasan dana, ketidaksesuaian anggaran, maupun keterlambatan proses administrasi keuangan. Hal ini sejalan dengan Rahmasari dan Setiawan (2022) yang menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang matang mendukung akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme monitoring keuangan yang diterapkan oleh PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya berkontribusi dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan kepatuhan cabang terhadap prosedur keuangan perusahaan. Monitoring yang dilakukan secara berkala memungkinkan kantor wilayah untuk memperoleh gambaran kondisi keuangan cabang secara menyeluruh. Ketersediaan informasi keuangan yang akurat dan berkelanjutan mendukung proses pengawasan yang lebih terstruktur dan sistematis. Temuan ini sejalan dengan Ajrina et al. (2024) dan Maulida dan Tumirin (2025) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan keuangan.

Informasi keuangan yang tersaji secara tepat waktu juga memungkinkan kantor wilayah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan cabang secara lebih efektif. Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek pencapaian anggaran, tetapi juga pada kesesuaian pelaksanaan operasional dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, kantor wilayah dapat memberikan arahan dan rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas operasional cabang. Pernyataan ini sejalan dengan Jemiran (2025) yang menekankan bahwa kualitas informasi keuangan menjadi dasar penting dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan manajerial.

Selain itu, efektivitas operasional cabang juga dipengaruhi oleh kemampuan kantor wilayah dalam mengoordinasikan pengelolaan keuangan antar unit kerja. Koordinasi yang berjalan dengan baik memungkinkan terjadinya keselarasan antara perencanaan keuangan dan pelaksanaan operasional di tingkat cabang. Melalui koordinasi yang intensif, kantor wilayah dapat membantu cabang dalam menyelesaikan permasalahan keuangan secara cepat dan tepat, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan aktivitas operasional harian. Hal ini sejalan dengan Maanary dan Handayani (2023) yang menyatakan bahwa kualitas koordinasi dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.

Koordinasi pengelolaan keuangan yang efektif juga berperan dalam meminimalkan potensi perbedaan data dan kesalahan administrasi antar unit kerja. Dengan adanya komunikasi yang berkelanjutan antara kantor wilayah dan cabang, setiap permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Kondisi ini menciptakan alur kerja yang lebih efisien serta mendukung kelancaran proses operasional secara keseluruhan, sebagaimana dikemukakan oleh Gesah et al. (2024) bahwa penguatan sistem pengendalian internal dan koordinasi mampu meningkatkan efektivitas operasional organisasi.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan operasional yang efektif tidak hanya berdampak pada aspek keuangan semata, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja operasional perusahaan. Keterpaduan antara perencanaan keuangan, mekanisme pengendalian, serta koordinasi antar unit kerja menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas operasional di tingkat kantor wilayah maupun cabang.

4. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan operasional di PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya dapat disimpulkan telah berjalan cukup efektif dan sistematis. Hal ini tercermin dari penerapan pengendalian internal yang memadai melalui mekanisme maker, checker, dan validator dalam setiap proses transaksi keuangan, yang berkontribusi dalam meminimalkan risiko kesalahan pencatatan serta meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, seperti PASSION, STREAM, SIMPONI, eTrust, dan SAP, mendukung terciptanya ketertiban administrasi serta meningkatkan keandalan dan konsistensi data keuangan di tingkat kantor wilayah. Lebih lanjut, keberadaan kantor wilayah sebagai unit pengendali memiliki peran penting dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan operasional cabang. Integrasi antara pengendalian internal dan sistem informasi keuangan memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih efektif, serta memperkuat transparansi dan keterlacakan transaksi keuangan. Dengan demikian, informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal dalam mendukung fungsi pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan. Secara umum telah berjalan efektif, pengelolaan keuangan operasional masih menunjukkan adanya dinamika operasional berupa potensi perbedaan data antar sistem serta ketergantungan pada ketelitian sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan operasional tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem dan prosedur yang diterapkan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan pengendalian internal dan kualitas pelaksanaan di tingkat operasional.

Referensi

1. Ajrina, A., Hazmi, Y., Farisi, B. A., & Mauliza, N. (2024). Implementation of an accounting information system improving the quality of financial reporting. *The ES Accounting and Finance*, 2(3), 160–165. <https://doi.org/10.58812/esaf.v2i03.294>
2. Aryani, D. (2023). Pengendalian anggaran dan efisiensi operasional organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 115–126. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jakp>
3. Gesah, R., Prabowo, M., Minami, E., & Kurniawan, S. T. (2024). STRENGTHENING CASH MANAGEMENT THROUGH EFFECTIVE INTERNAL CONTROL SYSTEMS. *Journal of Accounting and Tax*, 03(02). <https://journal.unita.ac.id/index.php/jat/article/view/1346>
4. Intan Sri Rahayu, S. A. K., & Budiasih, I. G. A. N. (2024). Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Teknologi Informasi dan Fraudulent Financial Reporting di LPD. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6). <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i06.p10>
5. Jemiran, Y. (2025). Accounting information systems and financial reporting quality. *Contabilita: Journal of Accounting and Finance*, 6(1), 45–56. <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/CAF/article/view/775>
6. Josepina, A., & Sujana, I. K. (2024). Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(5). <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i05.p14>
7. Maanary, A. N., & Handayani, N. (2023). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, SASARAN ANGGARAN, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA ORGANISASI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(4), 340–354. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i4.6137>
8. Maulida, B. N., & Tumirin. (2025). Sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 22–34. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/2887>
9. Musyarofah, M., & Indarti, M. G. K. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Realisasi Anggaran sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 14(1), 219–239. <https://doi.org/10.30588/jmp.v14i1.2143>

10. Nasution, S. M., Putri, R. A., & Hakim, L. (2024). The influence of internal control and accounting information systems on financial reporting quality. *Informatics Management, Engineering and Information System Journal*, 6(2), 77–88. <https://jurnal.stmik-mi.ac.id/imeisj/article/view/260>
11. Nita Aryani STIE Malangkececwara, D. (2023). Integrated Financial Management Information System: Exploring Implementation Challenges and Benefits in Organizational Contexts. In *West Science Information System and Technology* (Vol. 1, Issue 01).
12. Puspita, A., Nikhal, Z. Z., & Toriq, A. (2024). Analisis Pengelolaan Arus Kas dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2019-2023. Oktober, 1(4), 376–386. <https://journal.lap4bangsa.org/index.php/jurama/article/view/177>
13. Putri, S. H. S., Aziz, A. J., & Melani, M. M. (2025). Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode RGEC pada PT. Pegadaian (Persero) Tbk Periode 2020-2024. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 19. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2515>
14. Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2022). Maturity of Internal Control System, the Capability of Internal Auditors, and Performance Accountability in Local Governments. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 159–176. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.830>
15. Sih Kusumawardhany, S., & Kurnia Shanti, Y. (2023a). Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JPMEMA) PENERAPAN INTERNAL CONTROL DALAM MEMINIMALKAN RESIKO SALAH SAJI LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN PERGURUAN CIKINI. 2(1). <http://journal.binainternusa.ac.id/index.php/jpmema>
16. Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1008>
17. Wakum, I. Y., Ramadanis, T., & Supratikta, H. (2024). IMPLEMENTATION OF FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(3), 1248–1253. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.148>